



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 422 /KPTS/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
347/KPTS/II/2026 PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 347/KPTS/II/2026 telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan usulan Rancangan Peraturan Gubernur dari Perangkat Daerah terkait, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 347/KPTS/II/2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 26);
11. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

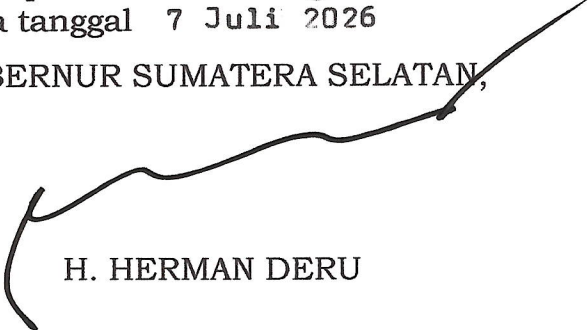
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 347/KPTS/II/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam hal tertentu terdapat kebutuhan yang dipandang perlu dan mendesak untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan kembali Rancangan Peraturan Gubernur untuk dimasukkan ke dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa yang terkait langsung secara substansi dengan agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dengan mengoordinasikan bersama Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/ mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 422 /KPTS/II/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 347/KPTS/II/2026 PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	STATUS		PD /Unit Kerja	TARGET PENYAMPALAN	KET
		BARU	UBAH			
1.	Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		✓	SEKWAN DPRD	Januari	
2.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2029	✓		DISKETPANGNAK	Januari	
3.	Pelaksanaan Riset dan Inovasi	✓		BALITBANGDA	Januari	
4.	Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan	✓		BALITBANGDA	Januari	
5.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	✓		BALITBANGDA	Januari	
6.	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim Provinsi Sumatera Selatan	✓		BAPPEDA	Januari	
7.	Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Sumatera Selatan	✓		BAPPEDA	Januari	
8.	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030	✓		BAPPEDA	Januari	

9.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027	✓		BAPPEDA	Januari	
10.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	✓		BAPPEDA	Januari	
11.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026		✓	BAPPEDA	Januari	
12.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026		✓	BAPPEDA	Januari	
13.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pengadaan Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISPERKIM	Januari	
14.	Analisis Standar Belanja	✓		BPKAD	Januari	
15.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	✓		BPKAD	Januari	
16.	Pemberian Biaya Kontribusi Tugas Belajar dan Fellowship bagi Dokter melalui Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/RSUD SITI FATIMAH	Januari	
17.	Perjanjian Kerjasama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/RSUD SITI FATIMAH	Januari	
18.	Kebijakan dan Sistem Akuntansi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/RSUD SITI FATIMAH	Januari	
19.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan pada BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		✓	DINKES/RSUD SITI FATIMAH	Januari	
20.	Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/RSUD SITI FATIMAH	Januari	
21.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINAS PU BM	Januari	

22.	Mekanisme dan Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	✓		DINAS PU BM	Januari	
23.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pengadaan Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISPERKIM	Januari	
24.	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISPERKIM	Januari	
25.	Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISPERKIM		
26.	Penyelenggaraan Sumatera Selatan <i>Corporate University</i>	✓		BPSDMD	Januari	
27.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	✓		BIRO ORGANISASI/ BPKAD	Januari	
28.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISKETPANGNAK	Januari	
29.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISKETPANGNAK	Januari	
30.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner dan Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISKETPANGNAK	Januari	

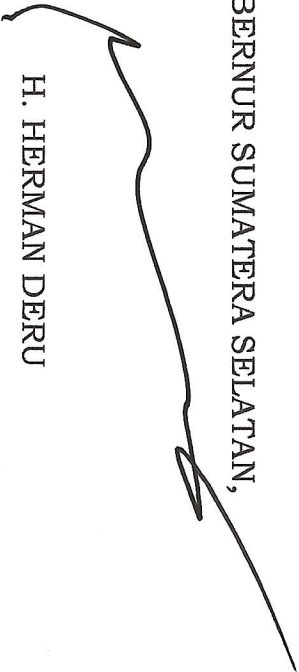
31.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner dan Kesnivet Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISKETPANGNAK	Januari	
32.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan	✓		BIRO KESRA	Januari	
33.	Satu Data Provinsi Sumatera Selatan	✓		DISKOMINFO	Januari	
34.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)	✓		DINKES	Januari	
35.	Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/BAPELKES	Januari	
36.	Penugasan Perseroda PT. Sumsel Energi Gemilang Untuk Turut Serta Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang Port</i> di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin	✓		BIRO PEREKONOMIAN	Januari	
37.	Pemberian Keringan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di lingkungan Kemham dan TNI	✓		BAPENDA	Januari	
38.	Pemberian Keringan Pajak Air Permukaan Khusus PLTU/PLTGU	✓		BAPENDA	Januari	
39.	Pemberian Keringan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026	✓		BAPENDA	Januari	
40.	Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	✓		BAPENDA	Januari	
41.	Pemberian Keringan dan Pembebasan Tunggakan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026	✓		BAPENDA	Januari	

42.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	✓		BPKAD	Januari	
43.	Analisis Standar Biaya (ASB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	✓		BPKAD	Januari	
44.	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Dinas Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi	✓		DISNAKERTRANS	Januari	
45.	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Higiene Perusahaan Kesehatan	✓		DISNAKERTRANS	Januari	
46.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Retribusi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	✓		DISNAKERTRANS	Januari	
47.	Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan	✓		BIRO ORGANISASI	Januari	
48.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	✓		DESDM	Januari	
49.	Remunerasi pada BLUD UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	✓		DESDM	Januari	
50.	Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/ RS ERNALDI BAHAR	Januari	
51.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINKES/ RS ERNALDI BAHAR	Januari	

52.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan		√	DISKOMINFO	Februari	
53.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	√		BIRO PBJ	Mei	
54.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit	√		DISNAKERTRANS/ DINAS PERKEBUNAN	Mei	
55.	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan	√		BIRO PEREKONOMIAN SETDA	Mei	
56.	Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		BIRO ORGANISASI	Mei	
57.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	√		BIRO HUKUM DAN HAM	Mei	
58.	Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	√		DINAS PPPA	Juni	
59.	Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	√		BAPPEDA	Juni	
60.	Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	√		BAPPEDA	Juni	

61.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	✓		DINAS PU BM	Juni	
62.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029	✓		DISPORA	Juni	
63.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit	✓		DINAS PERKEBUNAN	Juni	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU